

Representasi Kekuasaan Negara dalam Dokumen Kurikulum Merdeka: Analisis Wacana Kritis Model van Dijk

Salma Lidya¹

Ria Farawita

Yusak Hudyono

Widyatmiko Gede Mulawarman

Universitas Mulawarman

E-mail: salmalidya1245@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the discourse in the Kurikulum Merdeka document using the Critical Discourse Analysis (CDA) approach based on Teun A. van Dijk's model. The Kurikulum Merdeka, introduced in 2022, is claimed to offer flexibility and autonomy to schools, but it needs to be critically examined to identify how state power is structured within this educational policy. Through analysis of macrostructure, superstructure, and microstructure, the study shows that the state plays a dominant role in the transformation of national education, with narratives reinforcing state control over education. Despite the use of the term "merdeka belajar" (freedom to learn), the policy still reflects tight and centralized control. Ideologically, this curriculum shapes the student identity according to the state's vision, which is more of an ideological construct than a result of social negotiation. The findings conclude that the Kurikulum Merdeka functions not only as an educational guide but also as an ideological tool to reproduce state power in a seemingly neutral form.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Critical Discourse Analysis, Teun A. van Dijk

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana dalam dokumen Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. van Dijk. Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada 2022 diklaim memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada sekolah, namun perlu ditelaah secara kritis untuk mengidentifikasi bagaimana kekuasaan negara terstruktur dalam kebijakan pendidikan ini. Melalui analisis makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur, penelitian ini menunjukkan bahwa negara berperan sebagai agen dominan dalam transformasi pendidikan nasional, dengan narasi yang memperkuat kontrol negara atas pendidikan. Meskipun istilah "merdeka belajar" digunakan, kebijakan ini tetap mencerminkan kontrol yang ketat dan sentralistik. Secara ideologis, kurikulum ini membentuk identitas pelajar sesuai dengan visi negara, yang lebih bersifat konstruk ideologis daripada hasil negosiasi sosial. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka bukan hanya berfungsi sebagai panduan pendidikan, tetapi juga sebagai alat ideologis untuk mereproduksi kekuasaan negara dalam bentuk yang tampak netral.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Analisis Wacana Kritis, Teun A. van Dijk

PENDAHULUAN

Kurikulum bukan sekadar dokumen teknis yang mengatur proses pembelajaran di ruang kelas. Para ahli seperti Michael W. Apple (1979, 2004) menegaskan bahwa kurikulum merupakan produk politik dan budaya yang berfungsi sebagai alat ideologis negara. Apple menyebutkan bahwa melalui kurikulum, negara dan kelompok dominan berusaha mempertahankan kekuasaan dengan menentukan pengetahuan mana yang dianggap sah untuk diajarkan di sekolah. Dengan demikian, kurikulum mencerminkan struktur dan relasi kuasa yang ada di masyarakat. Siapa yang memiliki kewenangan menyusun kurikulum, sejatinya juga memiliki kuasa untuk menentukan arah pembentukan warga negara.

Dalam konteks Indonesia, Kurikulum Merdeka yang mulai diimplementasikan sejak 2022, diklaim membawa angin segar berupa fleksibilitas, pembelajaran berdiferensiasi, dan otonomi sekolah. Pemerintah mempromosikannya sebagai bagian dari semangat “merdeka belajar”, yang disebut-sebut memberi ruang lebih besar kepada guru dan siswa untuk menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan masing-masing. Namun, sebagaimana diingatkan oleh Stephen J. Ball (1994), bahasa kebijakan sering kali bersifat manipulatif—menggunakan retorika progresif untuk menutupi bentuk kontrol yang tetap dijalankan negara. Oleh karena itu, perlu ditelaah secara kritis apakah Kurikulum Merdeka benar-benar membawa pembebasan, atau justru membentuk cara baru dalam mengarahkan dan mendisiplinkan peserta didik melalui konstruksi wacana.

Untuk membaca dimensi kekuasaan yang tersembunyi dalam wacana Kurikulum Merdeka, pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) sangat relevan, khususnya model yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk (1993, 1995, 1998). Van Dijk memandang wacana sebagai praktik sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks kekuasaan, ideologi, dan produksi makna dalam masyarakat. Ia mengembangkan kerangka multidimensi yang mencakup analisis struktur teks (tema, gaya bahasa, dan narasi), konteks sosial, serta kognisi sosial yang terbentuk dari dan membentuk wacana itu sendiri. Dalam hal ini, dokumen kurikulum perlu dibaca bukan hanya sebagai teks administratif, tetapi sebagai alat diskursif di mana negara membentuk citra peserta didik ideal, mengatur relasi antara guru dan siswa, serta mengarahkan identitas dan nilai-nilai bangsa. Sebagaimana dikatakan Fairclough (1995), kebijakan pendidikan kerap menampilkan bahasa yang tampak netral namun sebenarnya sarat muatan ideologis.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengungkap bagaimana kekuasaan negara direpresentasikan dalam dokumen Kurikulum Merdeka. Fokus utama diarahkan pada analisis terhadap konstruksi wacana yang merefleksikan peran negara dalam menentukan arah dan isi pendidikan nasional. Dalam hal ini, peneliti akan menelaah bagaimana kekuasaan tersebut dimunculkan secara tekstual maupun kontekstual melalui berbagai strategi linguistik, struktur naratif, dan unsur ideologis dalam dokumen kebijakan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi elemen-elemen bahasa, seperti pemilihan diksi, penggunaan metafora, struktur kalimat, serta penyusunan tema, yang digunakan untuk mengukuhkan posisi negara sebagai aktor dominan dalam diskursus pendidikan. Selain itu, kajian ini akan menggali sejauh mana Kurikulum Merdeka mencerminkan relasi kuasa yang berlangsung dalam konteks sosial-politik Indonesia, termasuk bagaimana kebijakan ini berkontribusi dalam membentuk subjek warga negara sesuai dengan visi dan ideologi negara. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis model van Dijk, penelitian ini

berupaya membongkar proses representasi kekuasaan negara yang tidak selalu tampak secara eksplisit, namun hadir melalui praktik diskursif yang sistematis dalam dokumen kurikulum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis, yang menurut Creswell (2013) bertujuan untuk memahami dan mengungkap relasi kuasa, ideologi, serta struktur dominasi yang tersembunyi dalam teks dan praktik sosial. Dalam ranah kajian pendidikan, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak sekadar menggambarkan isi kurikulum, tetapi juga menelaah makna di balik penyusunan wacana kebijakan pendidikan yang diproduksi negara. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) sebagai pendekatan utama, dengan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk (1993, 1995, 1998). Van Dijk memandang wacana sebagai praktik sosial yang berkaitan erat dengan kekuasaan dan ideologi, di mana teks tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan proses kognisi yang melingkupinya. Model analisis van Dijk menekankan pentingnya melihat teks dalam tiga level utama: makrostruktur (tema dan topik utama), superstruktur (organisasi atau skema teks), dan mikrostruktur (unsur kebahasaan seperti pilihan kata, kalimat, gaya bahasa, dan retorika).

Data utama dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi Kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia, khususnya versi tahun 2022 dan 2023. Dokumen tersebut mencakup Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka, Capaian Pembelajaran, serta pidato-pidato kebijakan Menteri Pendidikan yang relevan dengan pengembangan kurikulum tersebut. Menurut Bowen (2009), dokumen resmi dapat menjadi sumber data yang valid dalam penelitian kualitatif karena merepresentasikan pandangan institusional dan menjadi artefak tekstual yang mencerminkan struktur kekuasaan. Oleh karena itu, dokumen ini bukan hanya dilihat sebagai produk administratif, melainkan juga sebagai konstruksi wacana yang merefleksikan kepentingan ideologis negara dalam mengarahkan pendidikan.

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginterpretasikan elemen-elemen makrostruktur untuk melihat bagaimana topik utama dibingkai, superstruktur untuk memahami bagaimana argumen kebijakan disusun dan diorganisasi, serta mikrostruktur untuk menggali pemilihan diksi, metafora, modalitas, dan strategi linguistik lainnya yang digunakan untuk membangun representasi tertentu tentang negara, warga negara, dan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Wodak dan Meyer (2001), pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap relasi kekuasaan yang tersembunyi dalam teks kebijakan, terutama dalam konteks di mana negara memproduksi makna melalui bahasa yang tampak netral namun ideologis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memetakan isi kurikulum, tetapi juga membongkar bagaimana wacana negara dibentuk dan direproduksi melalui teks-teks pendidikan resmi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap dokumen Kurikulum Merdeka dengan pendekatan Teun A. van Dijk, ditemukan bahwa pada level makrostruktur, negara diposisikan secara konsisten sebagai agen utama dalam transformasi pendidikan. Narasi yang dibangun dalam dokumen ini tidak menganggap negara sebagai fasilitator atau mitra dalam proses pendidikan, melainkan sebagai

pemimpin tunggal yang mengarahkan seluruh reformasi. Dokumen, terutama pada bagian pendahuluan dan latar belakang kebijakan, menggambarkan negara sebagai pelopor perubahan yang menentukan arah dan visi pendidikan nasional. Representasi ini menunjukkan dominasi negara dalam menentukan strategi dan kebijakan pendidikan, serta menegaskan otoritas mutlak negara terhadap visi dan arah pendidikan, bukan sebagai pihak yang hanya mendukung atau memfasilitasi kebutuhan lokal atau otonomi sekolah.

Pada level superstruktur, dokumen Kurikulum Merdeka disusun dengan cara yang sangat sistematis dan hierarkis, mulai dari penjabaran visi pemerintah, strategi implementasi, hingga mekanisme evaluasi. Struktur ini mencerminkan pola komunikasi top-down, di mana kebijakan dan arah pendidikan berasal dari pusat dan disebarkan ke berbagai satuan pendidikan. Tidak ditemukan ruang yang jelas untuk partisipasi atau dialog dari aktor lain seperti guru, komunitas lokal, atau peserta didik dalam proses pembentukan kebijakan ini. Dominasi narasi dari atas ini memperlihatkan kontrol yang kuat dari negara dalam membingkai makna “merdeka belajar”. Meskipun dalam teks tampak inklusif, secara struktural kebijakan ini tetap sangat sentralistik dan mengindikasikan kontrol negara yang ketat.

Pada tingkat mikrostruktur, analisis menunjukkan bahwa pilihan kata dan gaya bahasa yang digunakan dalam dokumen ini mencerminkan relasi kuasa yang timpang. Kata-kata seperti “ditetapkan”, “diarahkan”, dan “didorong oleh pemerintah” muncul secara konsisten, menegaskan posisi negara sebagai pengarah utama dalam kebijakan ini. Retorika yang digunakan memperkuat posisi negara sebagai subjek aktif, sementara pihak lain, seperti sekolah, guru, dan peserta didik, berada pada posisi pasif yang harus mengikuti dan menyesuaikan dengan arahan yang diberikan. Ironisnya, konsep “merdeka belajar” yang dikampanyekan justru seringkali bertentangan dengan bahasa kebijakan yang sarat dengan kontrol dan intervensi. Dalam hal ini, istilah tersebut berfungsi lebih sebagai slogan ideologis daripada prinsip operasional yang nyata mendukung kebebasan belajar.

Dari perspektif ideologis, negara tidak hanya bertindak sebagai pengatur teknis, tetapi juga sebagai pemilik visi tunggal mengenai “masa depan bangsa”. Konsep “profil pelajar Pancasila”, yang menjadi tujuan utama pendidikan nasional, sesungguhnya merupakan konstruksi ideologis tentang warga negara ideal menurut versi negara. Identitas pelajar yang dibentuk dalam kurikulum ini tidak berasal dari proses diskusi atau negosiasi sosial yang partisipatif, melainkan merupakan produk dari narasi hegemonik yang memuat nilai-nilai dominan. Hal ini sejalan dengan teori hegemoni Gramsci (1971), yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja dengan paksaan, melainkan melalui konsensus yang dibangun dalam institusi sosial seperti sekolah dan kurikulum. Oleh karena itu, dokumen Kurikulum Merdeka bukan hanya berfungsi sebagai panduan pendidikan, tetapi juga sebagai alat ideologis yang digunakan oleh negara untuk mereproduksi struktur kekuasaan dalam bentuk yang tampak netral dan teknokratis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka bukan hanya panduan pembelajaran, tetapi juga alat ideologis yang mencerminkan dominasi negara dalam pendidikan. Melalui analisis wacana kritis, terlihat bahwa negara berperan sebagai pemimpin tunggal dalam transformasi pendidikan, mengarahkan seluruh kebijakan dengan pendekatan top-down yang

mengurangi partisipasi dari aktor pendidikan lainnya. Pemilihan kata dan gaya bahasa dalam dokumen menguatkan kontrol negara, sementara konsep "merdeka belajar" justru bertentangan dengan kontrol yang ketat.

Secara ideologis, kurikulum ini membentuk identitas pelajar yang sesuai dengan visi negara, yang lebih bersifat konstruk ideologis daripada hasil negosiasi sosial. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka tidak hanya berfungsi sebagai panduan pendidikan, tetapi juga sebagai sarana untuk mereproduksi kekuasaan negara secara sentralistik dan ideologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Apple, M. W. (1979). *Ideology and curriculum*. Routledge & Kegan Paul.
- Apple, M. W. (2004). *Ideology and curriculum* (3rd ed.). Routledge.
- Ball, S. J. (1994). *Education reform: A critical and post-structural approach*. Open University Press.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*,
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Trans.). International Publishers.
- van Dijk, T. A. (1993). Principles of critical discourse analysis. *Discourse & Society*, 4(2), 249-283.
- van Dijk, T. A. (1995). Discourse analysis as ideology analysis. In C. Schaffner & A. Wenden (Eds.), *Language and peace* (pp. 17-33). Dartmouth.
- van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A multidisciplinary approach*. SAGE Publications.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2001). *Methods of critical discourse analysis*. SAGE Publications.
- Baker, C. (2006). *Multilingualism: A critical perspective*. SAGE Publications.
- Biesta, G. (2015). *The beautiful risk of education*. Paradigm Publishers.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1991). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Vintage Books.

- Hall, S. (1980). Culture, media and the ideological effect. In M. Gurevitch, T. Bennett, J. Curran, & J. Woollacott (Eds.), *Culture, society and the media* (pp. 315-348). Routledge.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. SAGE Publications.
- Harris, R. (1991). *The language of social control: Knowledge as power*. Routledge.
- Hodge, R., & Kress, G. (1988). *Social semiotics*. Polity Press.
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal discourse: The modes and media of contemporary communication*. Edward Arnold.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics*. Verso.
- Lankshear, C., & Knobel, M. (2003). *New literacies: Changing knowledge and classroom learning*. Open University Press.
- Luke, A. (1995). Text and discourse in education: An introduction to critical discourse analysis. In M. W. Apple (Ed.), *Review of research in education* (Vol. 21, pp. 3-48). American Educational Research Association.
- Ozga, J. (2000). *Policy research in educational settings: Contested terrain*. Buckingham: Open University Press.
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing education policy*. Routledge.
- Roth, W.-M., & Lee, Y. J. (2004). *Science, learning, and participatory democracy: A critical analysis*. Springer.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Thomas, P. (2012). *Critical theory and the education system*. Cambridge University Press.
- Wright, P. (1996). *The formation of modern thought: Rhetoric and ideology*. University of Chicago Press.
- Young, M. (2014). *The curriculum of the future: From the "New Sociology of Education" to a critical theory of learning*. Routledge.